

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang telah diuraikan oleh penulis secara seksama, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta yaitu DPRD Kota Yogyakarta dapat mengajukan rancangan peraturan daerah berwawasan lingkungan dengan pertimbangan menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan pada Kota Yogyakarta, sebagai salah satu upaya terpadu untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kelestarian lingkungan hidup. Di samping itu untuk menghindari kerugian terhadap lingkungan hidup baik itu pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup.
2. Hambatan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta adalah ada 2 (dua) hambatan baik itu internal maupun eksternal. Hambatan secara internal yaitu faktor Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas yang lemah dimana pada aspek pemahaman anggota DPRD Kota Yogyakarta tentang tugas dan fungsi DPRD, dimana menganggap bahwa pihak eksekutiflah yang bertanggung jawab dalam penyusunan Perda karena lebih memahami substansi masalah. Hambatan

eksternalnya yaitu belum ada indikator secara jelas untuk membuat perda berwawasan lingkungan agar mempermudah anggota DPRD Kota Yogyakarta untuk mempertimbangkan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berwawasan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis menjabarkan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia membuat suatu pedoman indikator-indikator mengenai perda yang berwawasan lingkungan hidup dalam bentuk peraturan teknis yang kemudian dijadikan pedoman bagi anggota DPRD Kota Yogyakarta serta kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta agar memahami dalam segala aspek penyusunan peraturan daerah yang berwawasan lingkungan hidup;
2. Anggota DPRD Kota Yogyakarta perlu diberikan pemahaman mengenai tugas, pokok, fungsi serta wewenang Legislatif (DPRD Kota Yogyakarta) oleh Ahli Hukum Tata Negara baik sebelum dan/atau sesudah diangkat menjadi Anggota DPRD Kota Yogyakarta, agar kualitas Sumber Daya Manusia lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yuliandi. 2006, *Bikameral Bukan Federal*, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta.
- A. Manan, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Bahrudin Supardi, 2009, *Berbakti Untuk Bumi*, Rosdakarya, Bandung.
- Dahlan Thaib, 2004, *DPR dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fatmawati, 2014, *Hukum Tata Negara*. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- Inosentius Syamsul, 2004, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi*, Adeksi, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1995, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Mnadar Maju, Bandung.
- Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012, Nomor 1.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 1.

C. Jurnal

Mira Rosana, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Muhamad Sadi Is, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Yudisial*, Vo. 13, No. 3 Desember 2020.

Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 18, 2011.

Yuriska, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2010.

Yusdianto, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Mei-Agustus 2012

D. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Wawasan”, terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wawasan>, diakses pada tanggal 14 April 2022.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, “Laporan Akhir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta”, https://drive.google.com/file/d/1cMK3906scXcat_KWIRIwVEU9S4TYt_bD/view, hlm. 18, diakses pada tanggal 31 Maret 2022.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7684/6.%20BAB%200II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

Pemerintah Kota Yogyakarta, “Profil Kabupaten/Kota”, <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/diy/yogyakarta.pdf>, hlm. 1, diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

Sekretariat Dewan DPRD Kota Yogyakarta, “Sejarah”, <https://setwan.jogjakota.go.id/page/index/sejarah>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022.